



INDIKATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN GENDER

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**



INDIKATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN GENDER

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

2021



INDIKATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN GENDER KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2021

ISBN :
No. Publikasi :
Katalog : 4102002.1402
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xiv + 74 halaman

Naskah:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu

Gambar Kulit:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu

Diterbitkan oleh:
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu

Dicetak oleh:
GMedia

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**TIM PENYUSUN PUBLIKASI
INDIKATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN GENDER
KABUPATEN INDRAGIRI HULU 2021**

Pengarah & Penanggung Jawab Umum:
Sukarwanto, SST

Penanggung Jawab Teknis:
Yeri Ramadani, SST

Editor:
Yeri Ramadani, SST

Penulis:
Riva Ramadhana Ziani, S.Tr.Stat

Pengolah Data:
Riva Ramadhana Ziani, S.Tr.Stat

Desain Kulit dan Infografis:
Riva Ramadhana Ziani, S.Tr.Stat

KATA PENGANTAR

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Capaian pembangunan manusia di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2016-2021 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Namun demikian, pencapaian dan kemajuan tersebut masih menyisakan pekerjaan dan tugas yang tidak ringan karena menurunnya capaian dimensi standar hidup layak akibat Pandemi Covid-19.

Publikasi ini menyajikan data dan informasi terpilah tentang perkembangan pembangunan manusia di sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dengan terbitnya publikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi program pembangunan daerah, dan kebijakan yang berperspektif gender.

Semoga publikasi capaian pembangunan manusia yang berjudul **Indikator Pembangunan Manusia dan Gender Kabupaten Indragiri Hulu 2021** ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum pengguna data statistik. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Rengat, Juni 2022

Kepala BPS Kabupaten Indragiri Hulu



Sukarwanto

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Ringkasan Eksekutif	xi
BAB 1 Konsep dan Pengukuran Pembangunan Manusia	1
1.1. Konsep Dasar Pembangunan Manusia	3
1.2. Pengukuran Pembangunan Manusia	4
1.3. IPM Indikator Penting Pembangunan Manusia	6
BAB 2 Potret Pembangunan Manusia	9
2.1. Perkembangan IPM Kabupaten Indragiri Hulu	11
2.2. Status Pembangunan Manusia Kabupaten Indragiri Hulu	12
2.3. Pembangunan Manusia di Kabupaten Indragiri Hulu dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	13
BAB 3 Kapabilitas Dasar: Capaian dan Tantangan	17
3.1. Capaian dan Tantangan Indikator Kesehatan	19
3.2. Capaian dan Tantangan Indikator Pendidikan	26
3.3. Capaian dan Tantangan Indikator Ekonomi	31
BAB 4 Mencapai Kesetaraan Gender	37
4.1. Indeks Pembangunan yang Terkait dengan Gender	39
4.2. Beberapa Ukuran Pemberdayaan Gender	40
4.3. Gambaran Pembangunan Gender	44
4.4. Ketidaksetaraan Gender dalam Kesehatan	45
4.5. Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan	48
4.6. Ketidaksetaraan Gender dalam Kegiatan Ekonomi	51
4.7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53
Lampiran	55

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.2.1. Perbandingan IPM Metode Lama dan IPM Metode Baru	5
Tabel 2.3.1. Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2021	15
Tabel 4.2.1. Komponen Penyusun GDI UNDP	42
Tabel 4.2.2. Komponen Penyusun nGDI UNDP	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1.1. Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hulu, 2016-2021	11
Gambar 2.3.1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2021	14
Gambar 3.1.1. Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu (tahun), 2016-2021	19
Gambar 3.1.2. Analisis Derajat Kesehatan (Konsep Henrik L. Blum)	20
Gambar 3.1.3. Indikator Lingkungan di Kabupaten Indragiri Hulu (persen), 2016 dan 2021	21
Gambar 3.1.4. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Indragiri Hulu, 2016 dan 2021	24
Gambar 3.1.5. Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir dan Tempat Berobat Jalan di Kabupaten Indragiri Hulu, 2021	25
Gambar 3.2.1. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Indragiri Hulu (tahun), 2016-2021	26
Gambar 3.2.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Indragiri Hulu (Persen), 2016-2021	29
Gambar 3.2.3. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Indragiri Hulu (persen), 2016-2021	30
Gambar 3.3.1. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Indragiri Hulu (ribu rupiah/orang/tahun), 2016-2021	31
Gambar 3.3.2. Tren Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu, 2017-2021	33
Gambar 3.3.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Indragiri Hulu, 2017-2021	34
Gambar 3.3.4. Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), 2021	35
Gambar 4.3.1. Perkembangan IPM, IPM Laki-Laki, IPM Perempuan, dan IPG di Kabupaten Indragiri Hulu, 2017-2021	45

Gambar 4.4.1.	Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Indragiri Hulu (tahun), 2017-2021	47
Gambar 4.5.1.	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi yang Diperoleh, 2021	48
Gambar 4.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan dan Laki-Laki di Kabupaten Indragiri Hulu, 2021	49
Gambar 4.5.3.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu (tahun), 2017-2021	50
Gambar 4.5.4.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Indragiri Hulu (tahun), 2017-2021	51
Gambar 4.6.1.	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita dalam Setahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu (ribu rupiah), 2017-2021	52
Gambar 4.6.2.	Selisih Pengeluaran Laki-Laki dan Perempuan di Kabupaten Indragiri Hulu (ribu rupiah), 2017-2021	53
Gambar 4.7.1.	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Indragiri Hulu, 2017-2021	54

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 70,01. Nilai capaian IPM pada tahun 2021 mengalami peningkatan 0,18 poin dibanding tahun 2020. Adanya peningkatan capaian IPM akibat pulihnya kondisi ekonomi setelah Pandemi Covid-19, dengan nilai capaian IPM 2021 telah berada di rentang angka 70 hingga 80, kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Indragiri Hulu kembali berstatus 'tinggi'.

Capaian IPM Kabupaten Indragiri Hulu berada di urutan kedelapan di antara capaian kabupaten dan kota lain di Provinsi Riau. Capaian IPM Kabupaten Indragiri Hulu sejalan dengan capaian nilai semua dimensi pembentuk IPM-nya yang perlahan meningkat seiring mulai membaiknya kondisi pasca Covid-19. Dimensi pembentuk IPM terbagi atas tiga, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat yang dicerminkan dari umur harapan hidup saat lahir (UHH), dimensi pengetahuan terdiri dari harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS), serta dimensi standar hidup layak yang dilihat dari pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan.

Capaian pembangunan kesehatan. Umur harapan hidup Kabupaten Indragiri Hulu mencapai 70,26 tahun. Ini menunjukkan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2021 memiliki peluang untuk hidup hingga usia 70-71 tahun.

Capaian pembangunan pendidikan. Pada tahun 2021, harapan lama sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu mencapai 12,46 tahun. Hal ini berarti bahwa anak usia 7 tahun di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki peluang untuk bersekolah selama 12-13 tahun, yaitu tamat pendidikan sekolah

menengah atas (SMA/SMK) hingga melanjutkan ke Diploma I tetapi tidak lulus. Sementara itu, rata-rata lama sekolah mencapai angka 8,39 tahun. Artinya, penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Indragiri Hulu secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8-9 tahun, yaitu kelas IX (3 SMP) tetapi tidak lulus.

Capaian pembangunan perekonomian. Pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu telah mencapai 10,26 juta rupiah pada tahun 2021, naik 58 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya. Pengurangan dan pembatasan kegiatan karena adanya Pandemi Covid-19 telah melonggar sehingga masyarakat dapat kembali melakukan aktivitas ekonomi sosial. Akibatnya, pendapatan masyarakat sedikit meningkat dan masyarakat dapat meningkatkan pengeluarannya.

BAB 1

KONSEP DAN PENGUKURAN PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM diukur melalui 3 Dimensi

Umur panjang dan hidup sehat



BAB 1

Konsep dan Pengukuran Pembangunan Manusia

1.1. Konsep Dasar Pembangunan Manusia

Manusia sudah sepantasnya menjadi tujuan utama dalam pembangunan, karena manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Keberhasilan pembangunan seyogyanya juga diikuti oleh peningkatan kualitas manusianya. Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Hal ini harus terjadi pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, fokus utama pembangunan manusia adalah pada manusia dan kesejahteraannya.

Konsep pembangunan manusia memang terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia menekankan pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat. Tidak hanya itu, pembangunan manusia juga berbicara tentang perluasan kapabilitas individu dan komunitas untuk memperluas jangkauan pilihan mereka dalam upaya memenuhi aspirasinya.

Menurut Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Development Programs* (UNDP), pembangunan manusia dirumuskan sebagai upaya perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choice of people*). “Perluasan pilihan” hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki: peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut

sudah dapat merefleksikan, secara minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah.

1.2. Pengukuran Pembangunan Manusia

Pengukuran pembangunan manusia menggunakan pengukuran yang sudah diperkenalkan oleh UNDP dalam laporan *Human Development Report* pada tahun 1990. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);

Dimensi ini diwakili oleh indikator umur harapan hidup pada waktu lahir. Pertimbangannya adalah umur harapan hidup yang tinggi mencerminkan tingkat kesehatan dan gizi yang baik. Umur harapan hidup pada waktu lahir diukur dengan tahun.

2. Pengetahuan (*knowledge*);

Dimensi ini diwakili oleh indikator harapan lama sekolah yang mencerminkan harapan bagi penduduk usia 7 tahun untuk merasakan bangku pendidikan dan indikator rata-rata lama sekolah yang mencerminkan lamanya penduduk usia 25 tahun ke atas telah mengenyam bangku sekolah.

3. Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Dimensi ini diwakili oleh indikator pendapatan per kapita. Namun agar dapat diperbandingkan antar negara, angka pendapatan per kapita tersebut perlu disesuaikan daya belinya melalui konsep yang disebut "*purchasing power parity*" (PPP) atau daya beli yang disesuaikan. Penyesuaian perlu dilakukan untuk mencerminkan adanya "*diminishing return of the income utility*".

Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Perubahan yang dilakukan UNDP terhadap penghitungan IPM disadari atas kebutuhan bahwa suatu indeks komposit seperti IPM harus mampu menjadi alat ukur yang tepat, dengan pemilihan variabel dan metode yang akurat. Tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM. Metode agregasi IPM pun mengalami penyempurnaan, dari rata-rata aritmetik diubah menjadi rata-rata geometrik. Sedangkan metode agregasi untuk indeks pendidikan berubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmetik.

Tabel 1.2.1. Perbandingan IPM Metode Lama dan IPM Metode Baru

Dimensi	Indikator	
	Metode Lama	Metode Baru
(1)	(2)	(3)
Umur panjang dan hidup sehat	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas
Standar hidup layak	Pengeluaran Per Kapita: 27 Komoditas Paritas Daya Beli	Pengeluaran Per Kapita: 96 Komoditas Paritas Daya Beli
Agregasi	Rata-Rata Aritmetik	Rata-Rata Geometrik
Perubahan capaian	Reduksi <i>Shortfall</i> (RSF)	Pertumbuhan

Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan menggunakan metode baru. Indonesia melakukan beberapa penyesuaian terhadap metode baru. Penyesuaian ini dilakukan pada indikator PNB per kapita, karena ketidakterediaan data pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga di antaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, diproksi dengan pengeluaran per kapita setahun yang disesuaikan. Perbandingan penghitungan IPM metode lama dengan metode baru yang digunakan oleh BPS dapat dilihat pada tabel 1.2.1.

1.3. IPM Indikator Penting Pembangunan Manusia

Menurut UNDP, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Dengan kata lain, tujuan tersebut dapat dicapai dengan memperbanyak pilihan-pilihan yang dapat dimiliki manusia.

Oleh karena itu, IPM adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan membangun kualitas hidup manusia, dalam hal ini masyarakat atau penduduk suatu wilayah. Penggunaan IPM sebagai ukuran karena dimensi penyusunnya adalah kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Di tingkat pusat maupun daerah, angka IPM menunjukkan ukuran kinerja yang dipakai untuk mengevaluasi proses pembangunan sumber daya manusia, baik capaian, kecepatan, posisi, maupun disparitas antardaerah

Selain itu IPM dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal sebagai berikut:

- Untuk mengalihkan fokus perhatian para pengambil keputusan, media, dan organisasi nonpemerintah dari penggunaan statistik ekonomi biasa, agar lebih menekankan pada pencapaian manusia. IPM

diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dan segenap kemampuannya seharusnya menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan sebuah negara, bukannya pertumbuhan ekonomi.

- Untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan suatu negara. Bagaimana dua negara yang tingkat pendapatan per kapitanya sama dapat memiliki IPM yang berbeda.
- Untuk memperlihatkan perbedaan di antara negara-negara, di antara provinsi-provinsi (atau negara bagian), di antara gender, kesukuan, dan kelompok sosial ekonomi lainnya. Dengan memperlihatkan disparitas atau kesenjangan di antara kelompok-kelompok tersebut, maka sumber masalah dan solusinya dapat dicari.

BAB 2

POTRET PEMBANGUNAN MANUSIA

Capaian IPM Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2021 sebesar **70,01**
yang termasuk ke dalam **kategori tinggi**



BAB 2 Potret Pembangunan Manusia

2.1. Perkembangan IPM Kabupaten Indragiri Hulu

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan pendidikan yang sebelum pandemi dilakukan dengan tatap muka, sekarang dilakukan dengan virtual. Transaksi langsung dan kegiatan sosial ekonomi yang menimbulkan kerumunan juga banyak dihindari. Seluruh indikator ekonomi makro dan sosial juga mengalami tekanan yang berat, tidak terkecuali IPM.

Gambar 2.1.1
Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hulu, 2016-2021



Sumber: BPS Provinsi Riau

Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Indragiri Hulu mengalami kenaikan menjadi 70,01. Angka ini meningkat 0,18 poin dari tahun 2020 dimana capaian pada tahun tersebut sebesar 69,83. Sepanjang tahun 2016 hingga 2019, capaian IPM Kabupaten Indragiri Hulu meningkat 2 poin. Ketika Covid-19 mulai merebak pada awal tahun 2020, capaian IPM mengalami penurunan akibat penurunan dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh variabel pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Indragiri Hulu mulai meningkat kembali setelah perekonomian perlahan pulih dari pandemi Covid-19.

Selain melihat capaian IPM, kecepatan pembangunan manusia juga perlu diperhatikan untuk dapat melengkapi sudut pandang. Kecepatan lebih menunjukkan upaya yang telah dilakukan untuk mencapai suatu level tertentu dalam pembangunan manusia. Kecepatan pembangunan manusia diukur dengan pertumbuhan IPM. Selama periode 2016-2021, pertumbuhan IPM Kabupaten Indragiri Hulu setiap tahunnya menurun kecuali pada tahun 2018 dan 2021 yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1,00 persen dan 0,26 persen. Rata-rata pertumbuhan IPM 2016-2021 adalah sebesar 0,49 persen per tahun.

Pada periode 2016-2021, pertumbuhan IPM Kabupaten Indragiri Hulu tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 0,99 persen dan terendah pada tahun 2020, yaitu terkontraksi 0,31 persen.

2.2. Status Pembangunan Manusia Kabupaten Indragiri Hulu

IPM yang dihitung oleh UNDP digunakan untuk melihat posisi Indonesia di tingkat global. Namun dalam rangka memonitor capaian pembangunan manusia antarwilayah, BPS menghitung IPM pada tingkat regional, yaitu provinsi dan kabupaten/kota, baik pertumbuhannya maupun statusnya. Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia merupakan cara lain untuk melihat perkembangan pembangunan manusia. Berubahnya

status pembangunan manusia dapat dijadikan indikator dalam membaca perkembangan pembangunan manusia. BPS mengelompokkan status capaian pembangunan manusia berdasarkan IPM menjadi 4 kelompok, yaitu:

- sangat tinggi: $IPM \geq 80$
- tinggi: $70 \leq IPM < 80$
- sedang: $60 \leq IPM < 70$
- rendah: $IPM < 60$

Berdasarkan klasifikasi tersebut, IPM Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2016 hingga 2021 termasuk ke dalam kategori sedang dan tinggi. Perubahan status IPM Kabupaten Indragiri Hulu menjadi tinggi terjadi pada tahun 2019 dan 2021. Saat ini, Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan capaian IPM berstatus tinggi. Capaian ini merupakan akumulasi dari capaian di tahun-tahun sebelumnya.

2.3. Pembangunan Manusia di Kabupaten Indragiri Hulu dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Pada tahun 2021, pencapaian pembangunan manusia kabupaten/kota di Riau cukup bervariasi. Terjadi peningkatan IPM pada semua kabupaten dan kota di Provinsi Riau setelah pandemi Covid-19, termasuk IPM Kabupaten Indragiri Hulu yang kembali menyandang predikat “tinggi” dalam kategori pembangunan manusia, setelah menyandang predikat “sedang” pada tahun sebelumnya.

Dari dua belas kabupaten/kota yang ada di Riau, sebanyak tujuh kabupaten mencapai kategori tinggi, yaitu Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Pelalawan, Siak, Kampar, Bengkalis, dan Dumai. Empat kabupaten/kota lainnya yang memiliki capaian “sedang” adalah Indragiri Hilir, Rokan Hulu,

Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti. Sedangkan Kota Pekanbaru merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Riau yang berada pada kategori sangat tinggi.

Gambar 2.3.1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2021



Sumber: BPS Provinsi Riau

Nilai capaian pembangunan manusia di Kabupaten Indragiri Hulu tidak terlepas dari tiga dimensi, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Capaian yang telah dicapai Kabupaten Indragiri Hulu dari sisi pembangunan manusia merupakan sesuatu yang perlu diapresiasi. Butuh waktu dan upaya yang cukup keras untuk meningkatkan status pembangunan manusia, dan Kota Pekanbaru

telah berhasil mencapainya. Namun, selain berbangga, kita juga perlu memperhatikan bahwa masih ada beberapa kabupaten yang masih berada pada kategori sedang. Ini mengindikasikan bahwa pemerataan pembangunan manusia di Provinsi Riau pada umumnya belum merata.

Terdapat tiga dimensi dasar yang menyusun indeks pembangunan manusia, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur melalui indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi pengetahuan diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Dimensi standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita.

Tabel 2.3.1 Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2021

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Perkapita (ribu rupiah/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kuantan Singingi	68,60	13,34	8,75	10 309
Indragiri Hulu	70,26	12,46	8,39	10 260
Indragiri Hilir	67,98	11,93	7,24	9 945
Pelalawan	71,24	12,41	8,70	11 672
Siak	71,13	12,81	9,86	11 807
Kampar	70,83	13,55	9,27	10 858
Rokan Hulu	70,18	12,85	8,54	9 406
Bengkalis	71,24	12,88	9,70	11 415
Rokan Hilir	70,39	12,76	8,26	9 417
Kep. Meranti	67,78	12,83	7,84	7 780
Kota Pekanbaru	72,41	15,55	11,92	14 360
Kota Dumai	70,98	13,31	10,14	11 818
Riau	71,67	13,28	9,19	10 736

Sumber: BPS Provinsi Riau

Pada tahun 2021, Umur Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu adalah 70,26 tahun, artinya bayi-bayi yang dilahirkan di tahun 2021 diharapkan dapat hidup hingga usia 70 tahun. Selain itu, Harapan Lama Sekolah mencapai 12,46 tahun. Ini berarti secara rata-rata, anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12 tahun atau setara SMA. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2020 adalah 8,39 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9 tahun atau setara kelas IX (3 SMP) namun tidak lulus. Dari sisi pengeluaran, pengeluaran per kapita di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2021 sebesar 10,26 juta yang artinya rata-rata pengeluaran penduduk per tahun untuk kebutuhan makanan dan bukan makanan mencapai 10,26 juta per tahun per orang.

BAB 3

KAPABILITAS DASAR

Capaian dan Tantangan

Umur Harapan Hidup (UHH)
70,26 tahun



**Capaian dimensi IPM
Kabupaten Indragiri Hulu
tahun 2021**



Pengeluaran Per Kapita (PPP)
10.260 ribu rupiah/orang/tahun



Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
8,39 tahun

Harapan Lama Sekolah (HLS)
12,46 tahun

BAB 3

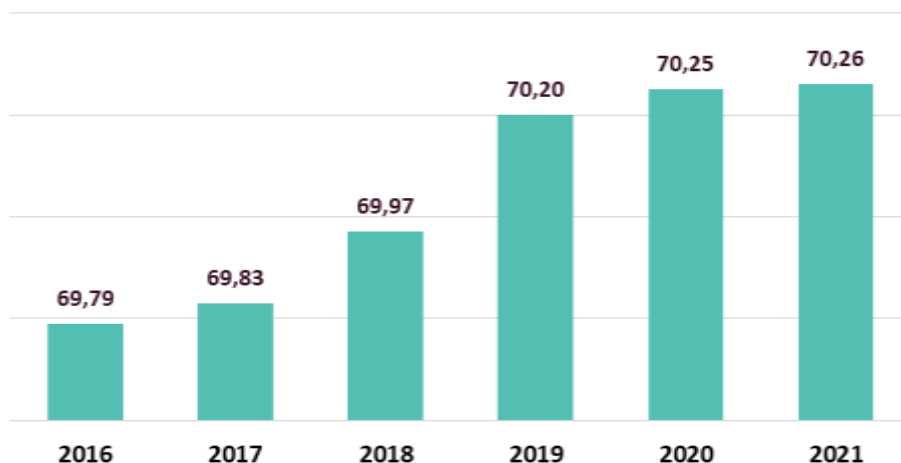
Kapabilitas Dasar : Capaian dan Tantangan

3.1. Capaian dan Tantangan Indikator Kesehatan

“Dimensi Kesehatan Lebih Baik”

Selama kurun waktu 2016 hingga 2021, umur harapan hidup Kabupaten Indragiri Hulu terus meningkat. Umur harapan hidup seorang anak saat lahir di Kabupaten Indragiri Hulu tumbuh rata-rata 0,09 persen per tahun. Pada tahun 2021, umur harapan hidup di Kabupaten Indragiri Hulu mencapai 70,26 tahun, meningkat 0,47 tahun dibandingkan tahun 2016. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat turut berperan dalam memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.

Gambar 3.1.1 Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu (tahun), 2016-2021

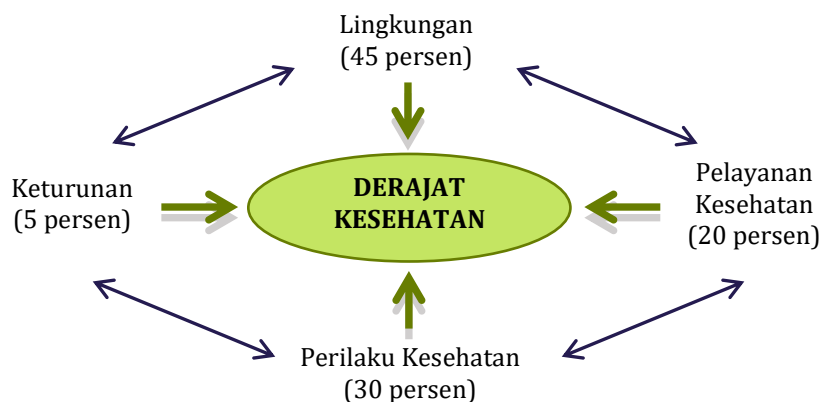


Sumber: BPS Provinsi Riau

Peningkatan kualitas hidup manusia sangat tergantung dari derajat kesehatannya. Derajat kesehatan menjadi salah satu pilar penentu kualitas hidup manusia selain pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kepedulian tinggi dari pemerintah dan seluruh masyarakat untuk senantiasa peduli pada peningkatan derajat kesehatan. Keberhasilan dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan ditandai dengan penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang tinggi.

Menurut Henrik L. Blum (www.depkes.go.id) peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dapat diukur dari tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk dipengaruhi oleh empat faktor penentu, yaitu: faktor-faktor lingkungan (45 persen), perilaku kesehatan (30 persen), pelayanan kesehatan (20 persen), dan keturunan (5 persen). Konsep Henrik L. Blum ini diilustrasikan melalui gambar 3.1.2 yang memperlihatkan hubungan derajat kesehatan dengan keempat faktornya.

Gambar 3.1.2
Analisis Derajat Kesehatan (Konsep Henrik L. Blum)



“Kondisi Lingkungan belum Sepenuhnya Sehat”

Berdasarkan konsep derajat kesehatan yang dikemukakan oleh Blum, faktor terbesar yang memengaruhi derajat kesehatan seseorang yaitu faktor lingkungan. Konsep ini menegaskan bahwa lingkungan yang baik akan mendorong secara langsung peningkatan derajat kesehatan. Tidak hanya itu, lingkungan yang baik juga secara tidak langsung berhubungan dengan keturunan dan pelayanan kesehatan. Beberapa indikator yang menunjukkan kondisi lingkungan dalam mendukung derajat kesehatan antara lain adalah fasilitas buang air besar, akses terhadap air minum layak, dan jenis lantai terluas.

Gambar 3.1.3
Indikator Lingkungan di Kabupaten Indragiri Hulu (persen),
2016 dan 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2016 dan 2021

Hasil data Susenas tahun 2021 menunjukkan bahwa hampir semua rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hulu sudah memiliki fasilitas tempat buang air besar. Fasilitas tempat buang air besar yang digunakan oleh

rumah tangga antara lain, fasilitas sendiri (89,05 persen), fasilitas bersama (1,55 persen) dan yang memanfaatkan fasilitas umum (1,42 persen).

Selain fasilitas tempat buang air besar, indikator lingkungan lain yang juga berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat adalah akses terhadap air bersih. Dengan adanya pembangunan sarana air bersih di suatu wilayah/daerah, beberapa infeksi oleh mikrobakteria, misalnya kolera, disentri, tifus, dan lainnya dapat dikurangi (Said, 1999). Sumber air minum bersih terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding dan sumur bor/sumur pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat minimal 10 meter. Pada tahun 2021, 79,78 persen rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hulu memiliki akses terhadap sumber air minum bersih. Sisanya, yaitu sekitar 20,22 persen adalah rumah tangga yang sumber air minum yang digunakan berupa sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan, air hujan, atau jarak sumber air minum ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat kurang 10 meter. Artinya masih ada sekitar 1 diantara 5 rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hulu yang rentan terhadap penyakit akibat mikrobakteria. Oleh sebab itu menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk memberikan penyuluhan mengenai kriteria sumber air bersih kepada masyarakat.

Selain beberapa indikator lingkungan di atas, jenis lantai rumah juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Lantai yang tidak berdebu pada musim kemarau dan tidak basah pada musim hujan, adalah syarat yang paling penting sehingga penularan penyakit dapat dihindari. Kriteria lantai yang baik adalah yang berasal dari ubin atau semen, bukan dari tanah, karena tanah cenderung lembab dan tidak memenuhi kriteria tersebut. Pada tahun 2021, di Kabupaten Indragiri Hulu terdapat 1,50 persen rumah tangga yang jenis lantai terluasnya adalah tanah.

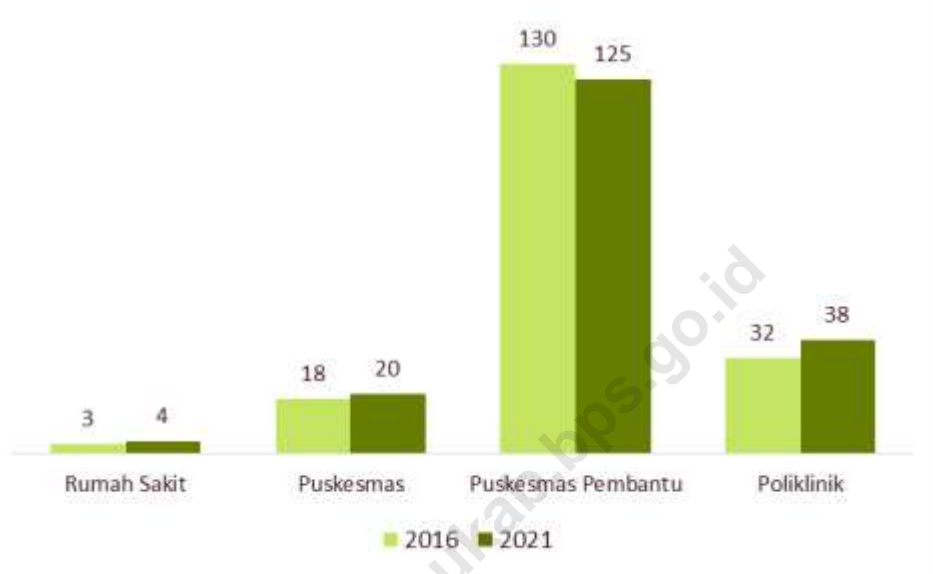
“Fasilitas Kesehatan Sudah Merata”

Dengan perkembangan berbagai indikator lingkungan di atas, maka secara umum kondisi lingkungan penduduk Kabupaten Indragiri Hulu belum sepenuhnya aman terhadap penularan penyakit. Beragam upaya memperbaiki lingkungan menjadi lebih sehat diprioritaskan untuk memperbaiki kesehatan masyarakat. Tanpa lingkungan yang sehat, berbagai penyakit akan cepat muncul dan menular sehingga akan menambah angka morbiditas yang pada akhirnya akan mengurangi angka harapan hidup.

Salah satu faktor penentu untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk adalah pelayanan kesehatan. Indikator yang dapat mengukur pelayanan kesehatan adalah ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan. Oleh sebab itu faktor kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus terus diupayakan dalam rangka membangun kesehatan masyarakat.

Berdasarkan data yang terlihat dari Gambar 3.1.4, jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Indragiri Hulu mengalami sedikit perubahan dari tahun 2016-2021. Jumlah rumah sakit, puskesmas, dan poliklinik di Kabupaten Indragiri Hulu sedikit bertambah, sedangkan jumlah puskesmas pembantu berkurang. Tampaknya pelayanan kesehatan diupayakan merata hampir di semua kecamatan. Keberadaan puskesmas, puskesmas pembantu, maupun fasilitas kesehatan lainnya tersebar di semua kecamatan. Peningkatan yang terjadi hampir di semua fasilitas kesehatan merupakan indikasi positif bahwa pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan telah berjalan dengan baik.

Gambar 3.1.4
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Indragiri Hulu,
2016 dan 2021



Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka, 2017 dan 2022

“Praktik Persalinan yang Aman Sudah Merata”

Salah satu indikator dalam upaya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi dalam rangka kesehatan reproduksi adalah persalinan dilakukan oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya). Hal ini penting karena persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis lebih aman dibandingkan oleh selain tenaga medis. Praktik persalinan yang aman menjadi salah satu faktor penentu keselamatan ibu dan bayi hingga pada akhirnya akan menurunkan risiko kematian keduanya.

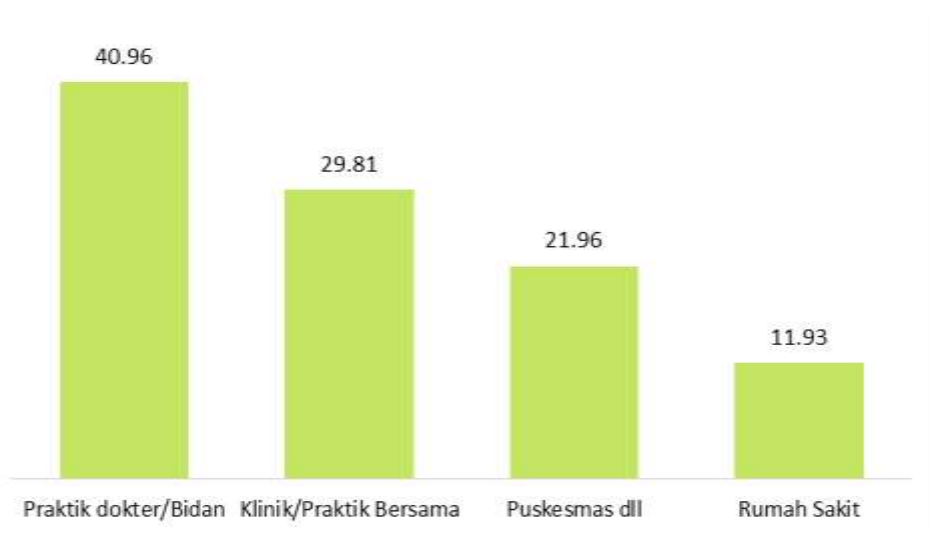
Pada tahun 2021 tercatat seluruh kelahiran bayi telah dibantu oleh tenaga medis, baik oleh dokter kandungan, dokter umum maupun bidan. Dapat diartikan bahwa Kabupaten Indragiri Hulu telah mencapai angka persalinan aman yang tinggi.

“Kesadaran terhadap Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Meningkat”

Akses terhadap pelayanan kesehatan dikatakan merata jika semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, pelayanan kesehatan dikelompokkan menjadi empat, yaitu rumah sakit pemerintah dan swasta; praktik dokter, bidan; klinik, praktik dokter bersama; dan puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), UKBM (poskesdes, polindes, posyandu, dan balai pengobatan), lainnya yang meliputi praktik batra (pengobatan tradisional), dukun bersalin, serta praktik nonmedis lainnya.

Praktik dokter/bidan adalah fasilitas kesehatan yang paling banyak dikunjungi oleh hampir sebagian penduduk yang berobat jalan di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2021. Selain praktik dokter/bidan, sebagian penduduk yang lain berobat jalan dengan memanfaatkan fasilitas klinik/praktik bersama, puskesmas, dan rumah sakit.

Gambar 3.1.5
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir dan Tempat Berobat Jalan di Kabupaten Indragiri Hulu, 2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2021

3.2. Capaian dan Tantangan Indikator Pendidikan

Pendidikan memperluas peluang seseorang untuk berkarya. Pendidikan juga meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Sebagai nilai tambah, pendidikan juga akan memperluas pilihan-pilihan lain. Manusia yang berpendidikan juga akan lebih memperhatikan tingkat kesehatan agar dapat hidup lebih lama. Tidak hanya itu, manusia yang berpendidikan juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas manusia agar dapat memperluas peluang mereka.

Dimensi pengetahuan dalam penghitungan IPM terdiri dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah menghitung peluang pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara rata-rata lama sekolah menghitung lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini diagregasikan menjadi indeks pendidikan dalam penghitungan.

Gambar 3.2.1
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Indragiri Hulu (tahun), 2016-2021



Sumber: BPS Provinsi Riau

Sampai dengan tahun 2021, kedua indikator ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah cenderung lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan harapan lama sekolah. Hal ini wajar karena rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator *output* pembangunan jangka panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas. Perlu diketahui, indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

Rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2021 telah mencapai 8,39 tahun atau setara dengan kelas IX (3 SMP) namun tidak selesai. Sementara anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 12,46 tahun atau tamat kelas XII (3 SMA) dan melanjutkan ke D-I namun tidak selesai. Selama enam tahun terakhir, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah terus meningkat. Rata-rata lama sekolah tumbuh rata-rata 1,40 persen per tahun sedangkan harapan lama sekolah tumbuh rata-rata 0,36 persen per tahun.

“Target Wajib Belajar sudah Tercapai”

Aspek pendidikan pada IPM dicerminkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Gambar 3.2.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 hingga 2021, harapan penduduk usia 7-24 tahun untuk meneruskan pendidikan meningkat menjadi 12,46 tahun. Hal tersebut sudah mencapai target pemerintah dalam wajib belajar 12 tahun. Meskipun demikian, pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu harus

tetap konsisten dalam menjalankan program-programnya di bidang pendidikan agar target yang diinginkan dapat tercapai.

Selain HLS, komponen pendidikan lain yang digunakan untuk menggambarkan aspek pendidikan adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Dari Gambar 3.2.1 terlihat bahwa RLS Kabupaten Indragiri Hulu terus meningkat dari tahun 2016 sampai 2021 meskipun peningkatannya relatif lambat. Pada tahun 2016, RLS di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 7,83 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Kabupaten Indragiri Hulu yang berumur 25 tahun ke atas telah bersekolah sampai kelas VIII (2 SMP) namun tidak selesai. Pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 8,39 tahun, yang berarti rata-rata penduduk Kabupaten Indragiri Hulu yang berumur 25 tahun ke atas telah bersekolah sampai kelas IX (3 SMP) namun tidak selesai.

Secara alamiah peningkatan RLS sangat dipengaruhi oleh peningkatan APS kelompok umur 19-24 tahun, terutama APS umur 24 tahun. Terkait dengan hal ini, upaya peningkatan dimensi pendidikan dapat difokuskan pada peningkatan APS kelompok 19-24 tahun karena dapat sekaligus meningkatkan indikator HLS dan RLS secara bersamaan.

“Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar Cukup Tinggi”

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan. Secara umum APS Kabupaten Indragiri Hulu mengalami peningkatan dari tahun 2016-2021. Gambar 3.2.2 menunjukkan capaian APS pada setiap kelompok umur sekolah di mana capaian APS 7-12 tahun sudah cukup tinggi. Meskipun dalam jangka waktu enam tahun terakhir APS 7-12 tahun mengalami penurunan sebesar 0,16 persen.

Gambar 3.2.2
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Indragiri Hulu (persen),
2016-2021



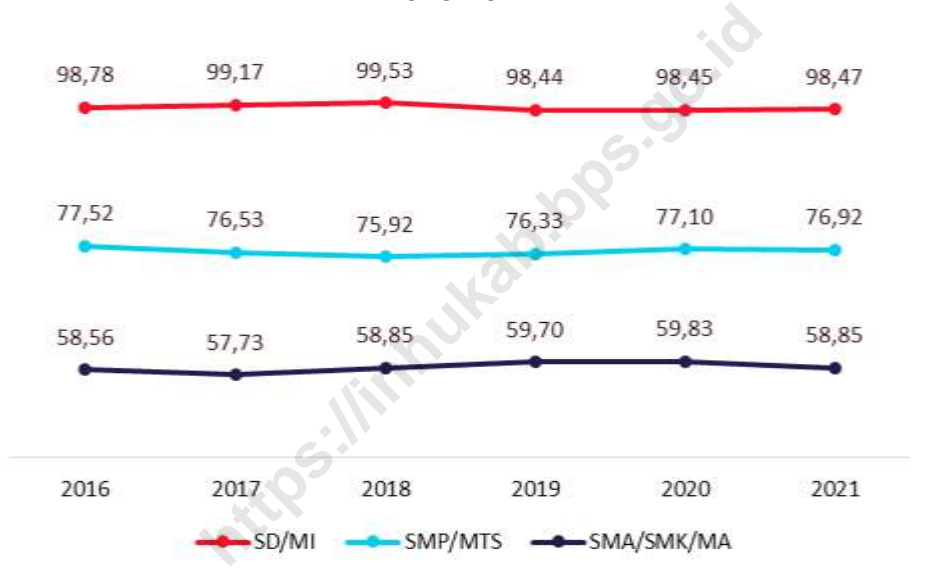
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu, 2016-2021

Hal lain yang patut dicermati yaitu belum semua penduduk pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang merupakan kelompok umur wajib belajar 9 tahun dapat berpartisipasi dalam pendidikan formal. Dengan melihat capaian APS pada saat ini, peningkatan APS pada jenjang usia 13-15 tahun masih perlu ditingkatkan karena Undang-Undang telah mengamanatkan agar warga negara dapat mengenyam pendidikan dasar selama 9 tahun.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah masih rendahnya APS 16-18 tahun yang capaiannya masih di bawah 75 persen. Padahal kelompok umur ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena tingginya biaya pendidikan di sekolah menengah atas dibandingkan dengan jenjang pendidikan di bawahnya.

Untuk mendapatkan gambaran utuh tentang partisipasi sesuai dengan jenjang pendidikan, indikator angka Partisipasi Murni (APM) lebih relevan. Secara umum, APM Kabupaten Indragiri Hulu untuk jenjang pendidikan SD mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2021.

Gambar 3.2.3
Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Indragiri Hulu (persen), 2016-2021



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu, 2016-2021

Hingga tahun 2021, capaian APM SD telah perlahan meningkat kembali menjadi 98,47 persen. Sementara itu, APM SMP sebesar 76,92 persen yang memberikan gambaran bahwa hampir seperempat anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang SMP.

Perkembangan APM SD mengalami fluktuasi sejak tahun 2016 hingga 2021 yang tidak begitu pesat, yaitu pada kisaran 98-99 persen. Begitu pula dengan perkembangan APM SMP yang berfluktuasi selama periode 2016 hingga 2021. Selama periode 2016-2021, APM SMP turun sekitar 0,60 persen, yakni dari 77,52 persen pada tahun 2016 menjadi 76,92 persen

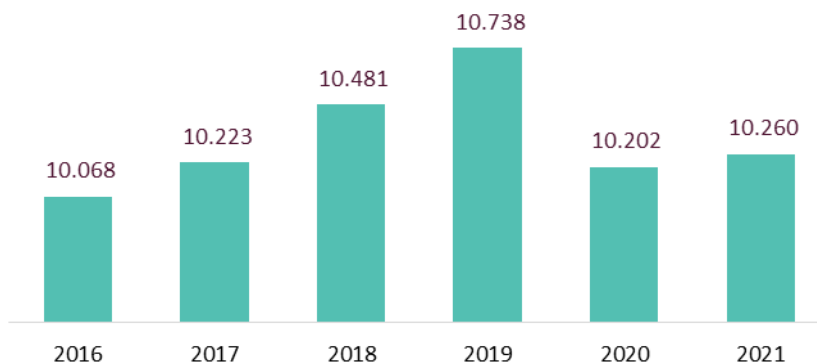
pada tahun 2021. Sedangkan APM SMA meningkat 0,29 persen, yakni dari 58,56 persen pada tahun 2016 menjadi 58,85 persen pada tahun 2021. Capaian APM SMP dan SMA pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pendidikan di tingkat SMP dan SMA belum dirasakan oleh seluruh anak usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Oleh karena itu, perlu program yang lebih komprehensif agar pendidikan dasar dirasakan oleh semua masyarakat.

3.3. Capaian dan Tantangan Indikator Ekonomi

“Standar Hidup Turun Terdampak Pandemi”

Pengeluaran atau pendapatan telah memberikan sedikit gambaran mengenai ukuran pembangunan, seperti yang telah terjadi pada era tahun 1970-an. Akan tetapi uang memiliki arti yang penting untuk memperluas pilihan, terutama bagi penduduk miskin. Oleh karena itu, perkembangan tingkat pengeluaran menjadi hal menarik untuk diteliti. Dimensi standar hidup layak dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Gambar 3.3.1
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita di Kabupaten Indragiri Hulu
(ribu rupiah/orang/tahun), 2016-2021



Sumber: BPS Provinsi Riau

Selama tahun 2016-2019, indikator ini selalu tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 2,17 persen per tahun. Namun pengeluaran per kapita yang disesuaikan pada tahun 2020 di Kabupaten Indragiri Hulu mengalami anjlok menjadi 10,20 juta rupiah per tahun akibat adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan turunnya konsumsi masyarakat secara umum. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Indragiri Hulu perlahan kembali meningkat menjadi 10,26 juta rupiah seiring dengan meredanya kasus pandemi Covid-19.

“Kemiskinan Menurun Menjelang Pandemi”

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pokok dalam pembangunan yang sifatnya multi aspek sehingga penanganannya juga perlu mendapat perhatian khusus. Kemiskinan menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kapabilitasnya. Hal tersebut masuk akal karena keterbatasan ekonomi menyebabkan seseorang tidak dapat mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, padahal kedua aspek tersebut merupakan kapabilitas dasar dalam pembangunan manusia.

Berdasarkan data Susenas pada bulan Maret 2020 menjelang pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi Kabupaten Indragiri Hulu, jumlah penduduk miskin mencapai 26,66 ribu jiwa. Dalam lima tahun terakhir (keadaan bulan Maret 2017-2021), persentase penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan tren menurun. Semula 6,94 persen pada tahun 2017 dan semakin menurun menjadi 6,18 persen pada tahun 2021.

Pengentasan kemiskinan ini telah diupayakan oleh pemerintah dengan berbagai macam program yang telah direncanakan baik di level nasional, provinsi, maupun kabupaten dan kota. Namun, perekonomian masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu masih berada di sekitar garis

kemiskinan. Ini tentu akan menghambat peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Indragiri Hulu.

Gambar 3.3.2
Tren Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu, 2017-2021

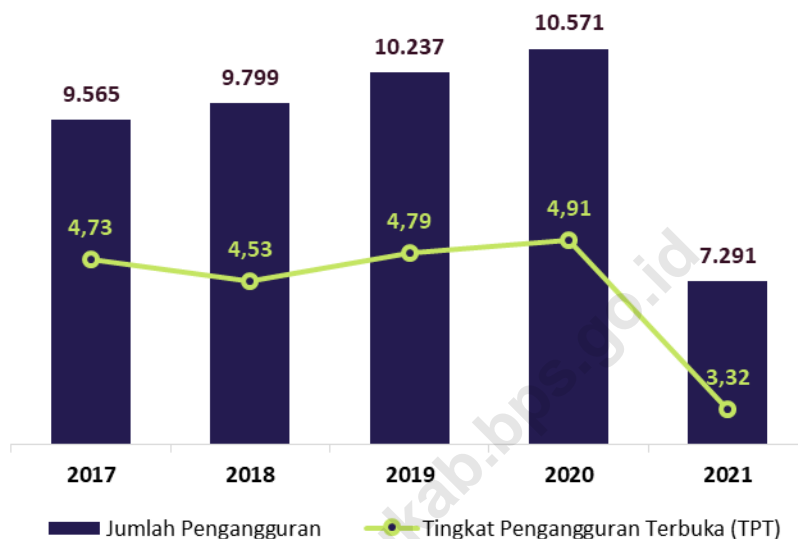


Sumber: BPS Provinsi Riau

“Pengangguran Meningkat”

Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Indragiri Hulu mencapai 3,32 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, dimana ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja. Perkembangan TPT di Kabupaten Indragiri Hulu selama lima tahun terakhir menurun pada tahun 2021 menjadi di bawah empat persen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan sebagai pekerja keluarga pada masa pandemi Covid-19.

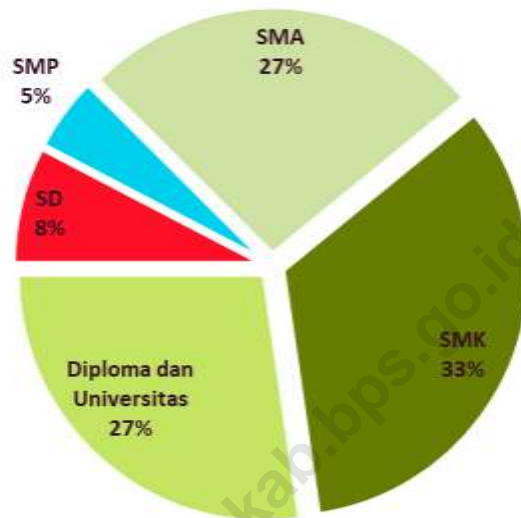
Gambar 3.3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Indragiri Hulu, 2017-2021



Sumber: Hasil Sakernas Agustus, 2017-2021 (diolah)

Dari 7.291 orang penganggur pada Agustus 2021, mayoritas penganggur berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 34 persen. Diikuti oleh penganggur berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta berpendidikan tinggi (Diploma dan Sarjana) yang keduanya memiliki persentase sebesar 27 persen. Sementara itu, penganggur yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 8 persen. Hanya 5 persen penganggur yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) (gambar 3.3.4).

Gambar 3.3.4
Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), 2021



Sumber: Hasil Sakernas Agustus 2021 (diolah)

BAB 4

MENCAPAI KESETARAAN GENDER

Capaian Dimensi IPM Kabupaten Indragiri Hulu
Menurut Gender Tahun 2021



Laki-laki

74,62



Perempuan

64,69

	IPM	
68,24	UHH (tahun)	72,17
8,61	RLS (tahun)	7,95
12,32	HLS (tahun)	12,87
16.043	PPP (ribu rupiah/orang/tahun)	6.485

BAB 4

Mencapai Kesetaraan Gender

4.1. Indeks Pembangunan yang Terkait dengan Gender

Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah gender sangatlah penting untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu, pengukuran pencapaian pembangunan manusia berbasis gender menjadi hal yang sangat diperlukan.

Pengukuran pembangunan gender di Indonesia dimulai sejak *United Nations Development Program* (UNDP) mengeluarkan laporan berkala yaitu *Human Development Report* (HDR) di tahun 1990 yang mencantumkan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran kemajuan suatu negara (BPS, 2015). Lima tahun kemudian, UNDP menambah konsep HDI dengan kesetaraan gender (*Gender Equality*). Sejak UNDP memasukkan kesetaraan gender dalam HDR, faktor kesetaraan gender selalu diikutsertakan dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan setiap negara.

Salah satu ukuran kesetaraan gender yang disusun UNDP sejak tahun 1995 adalah *Gender Development Index* (GDI) yang bertitik tolak pada konsep kesetaraan. Perhitungan GDI mencakup kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal capaian kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Di Indonesia, GDI atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) telah dihitung Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2009 atas kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Pada tahun 2010, UNDP melakukan perubahan metodologi pengukuran GDI disertai dengan penghitungan HDI laki-laki dan perempuan. Menyesuaikan perubahan ini, pada tahun 2015 Indonesia merilis IPG metode baru dengan *backcasting* data hingga tahun 2010.

4.2. Beberapa Ukuran Pemberdayaan Gender

Dalam kamus bahasa Indonesia, pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan. Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah kaum yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Oleh sebab itu, pemberdayaan gender lebih mengacu pada konsep adanya proses “*opportunity*” bukan pada hasil akhir atau *outcome*. Hal ini sesuai dengan konsep UNDP (1995) yang memfokuskan makna pemberdayaan pada “*opportunity*” bukan pada kapabilitas, yang menjadi ukuran *well-being*.

Pelibatan perempuan dalam berbagai aktivitas telah menjadi bagian komitmen dari berbagai organisasi dunia. Salah satu konferensi perempuan yang diselenggarakan UNDP di Beijing menghasilkan kesepakatan bahwa pemberdayaan perempuan dan partisipasi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pengambilan keputusan dan akses terhadap kekuasaan merupakan dasar bagi kesetaraan, pembangunan, dan perdamaian di dunia (UN, 1995). Selanjutnya, pengarusutamaan gender menjadi salah satu agenda penting dalam setiap penentuan kebijakan. Hal ini didasari atas pemikiran bahwa pemberdayaan gender bukan sesuatu hal yang bisa datang dengan sendirinya tanpa campur tangan eksternal (inisiatif khusus). Oleh sebab itu, program pemerintah perlu disusun untuk menciptakan kondisi bahwa perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi agen dalam pembangunan.

Konsep pemberdayaan juga bermakna suatu proses pembangunan kapasitas yang mengarah pada partisipasi, pengambilan keputusan, kontrol, dan tindakan perubahan ke arah yang lebih luas (Karl, 1995). Dengan

demikian, kesetaraan pemberdayaan gender ditujukan untuk tercapainya kesamaan akses laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan, pelibatan dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam lingkup publik maupun domestik.

Untuk mengevaluasi sejauh mana gambaran ketidaksetaraan gender diperlukan sebuah indikator. Indeks komposit umumnya dipilih sebagai suatu ukuran yang mengagregasikan berbagai indikator multidimensi. Di Indonesia, pengukuran kesetaraan gender merujuk pada UNDP. UNDP memiliki GDI sebagai salah satu indikator pengukuran kesetaraan gender yang telah disusun sejak tahun 1995. Latar belakang penyusunan GDI adalah adanya kelemahan HDI yang hanya menggambarkan pencapaian rata-rata seluruh penduduk, tanpa melihat adanya kesenjangan antarkelompok penduduk, termasuk gender. GDI kemudian diperbaiki tahun 2010 dengan adanya metode pengukuran baru yang disebabkan adanya berbagai permasalahan konseptual, metodologi, dan ketersediaan data, di antaranya permasalahan komponen pendapatan (Klasen, 2009). Uraian lebih rinci mengenai berbagai ukuran tersebut akan dibahas secara detail pada ulasan berikut.

1. *Gender Development Index (GDI)*

GDI mengukur pencapaian pembangunan manusia tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Melalui angka GDI, kesenjangan atau gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara GDI dengan HDI. Semakin tinggi rasionya maka semakin rendah gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan, sebaliknya semakin rendah rasio maka semakin tinggi gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. Apabila nilai GDI sama dengan HDI, maka dapat dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender. Sebaliknya, GDI lebih rendah dari HDI

menunjukkan kesenjangan gender yang tinggi. Dengan demikian, interpretasi GDI tidak terpisahkan dari analisis HDI.

GDI disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan HDI. Angka harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta sumbangan pendapatan mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika GDI dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

Tabel 4.2.1 Komponen Penyusun GDI UNDP

Dimensi	Indikator	Indeks Dimensi
(1)	(2)	(3)
Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Indeks Kesehatan
Pendidikan	1. Angka Melek Huruf 2. Rata-Rata Lama Sekolah	Indeks Pendidikan
Ekonomi	Sumbangan Pendapatan	Indeks Distribusi Pendapatan

2. *New Gender Development Index (nGDI)*

Penghitungan GDI berhenti dilakukan oleh UNDP mulai tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan GDI dengan menggunakan metode baru. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada HDI. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya. nGDI merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian pembangunan manusianya. Pada metode baru ini digunakan rasio HDI perempuan dengan HDI laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki.

Tabel 4.2.2 Komponen Penyusun nGDI UNDP

Dimensi	Indikator	Indeks Dimensi
(1)	(2)	(3)
Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Indeks Kesehatan
Pendidikan/ Pengetahuan	1. Angka Melek Huruf 2. Rata-Rata Lama Sekolah	Indeks Pendidikan
Ekonomi/Standard Hidup Layak	Pendapatan Nasional Bruto	Indeks Distribusi Pendapatan

Dalam metode baru ini, dimensi yang digunakan masih sama seperti yang GDI sebelumnya, yaitu: 1) umur panjang dan hidup sehat 2) pengetahuan; dan 3) standar hidup layak. Menurut UNDP, ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur kualitas hidup, dimana hakikatnya adalah mengukur capaian pembangunan manusia. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Adapun yang disempurnakan dari GDI sebelumnya adalah penggantian beberapa indikator untuk menyempurnakan metodologi yang digunakan. Dimensi pengetahuan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Pengukuran nGDI dianggap lebih baik karena memisahkan capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Selain itu konsekuensi dari penggunaan rasio pencapaian HDI perempuan terhadap laki-laki adalah interpretasi hasilnya yang memerlukan kehati-hatian. Nilai nGDI yang besar belum tentu menunjukkan kondisi pembangunan manusia yang tinggi. nGDI yang tinggi bisa terjadi karena HDI laki-laki dan perempuan sama-sama rendah.

4.3 Gambaran Pembangunan Gender

“Laju Pembangunan Perempuan Lebih Cepat Dibandingkan Laki-Laki”

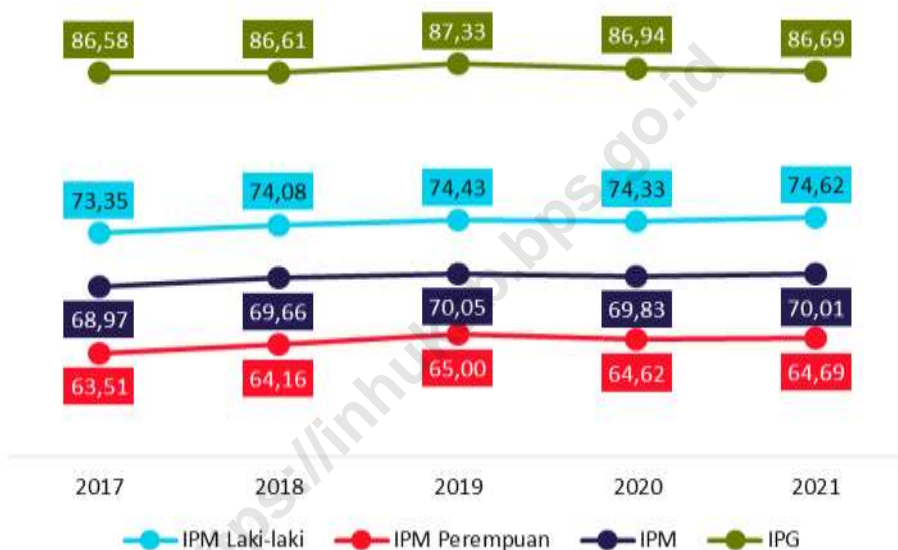
Banyak ahli mengemukakan pendapat tentang konsep pembangunan manusia. Namun Amartya Sen (1989) mengemukakan bahwa secara umum pembangunan manusia mengandung konsep yang luas, mencakup pemberdayaan, kerja sama, kesetaraan, keberlanjutan, dan keamanan. Untuk menyederhanakan konsep yang terlalu luas ini, UNDP menyusun ukuran pembangunan manusia yang dikenal sebagai *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun IPM belum mempertimbangkan ketimpangan gender sehingga UNDP mengembangkan *Gender Development Index* atau Indeks Pembangunan Gender sebagai turunan IPM. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki. Melalui IPG dapat diukur kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin mendekati 100, maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka interpretasi tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial. Kualitas manusia dalam IPM diukur dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Komponen pembentuk IPM yang digunakan adalah angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi).

Selama lima tahun terakhir, IPM laki-laki dan IPM perempuan di Kabupaten Indragiri Hulu sama-sama mengalami peningkatan. Secara umum kualitas perempuan masih tertinggal dari laki-laki. IPM laki-laki sudah masuk dalam kategori pencapaian tinggi (antara 70 sampai dengan

80), sedangkan IPM perempuan masuk dalam kategori sedang (antara 60 sampai dengan 70). Akan tetapi dari sisi kecepatannya, capaian pembangunan perempuan memiliki akselerasi yang lebih tinggi. Hal inilah yang menjadi pendorong peningkatan IPG selama beberapa tahun.

Gambar 4.3.1 Perkembangan IPM, IPM Laki-Laki, IPM Perempuan, dan IPG di Kabupaten Indragiri Hulu, 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Riau

Beberapa faktor diduga menjadi penyebab masih rendahnya capaian IPM perempuan dibandingkan laki-laki. Untuk analisis lebih jauh, perlu dilakukan perbandingan pencapaian pembangunan manusia di setiap dimensi, baik kesehatan, pendidikan maupun ekonomi.

4.4. Ketidaksetaraan Gender dalam Kesehatan

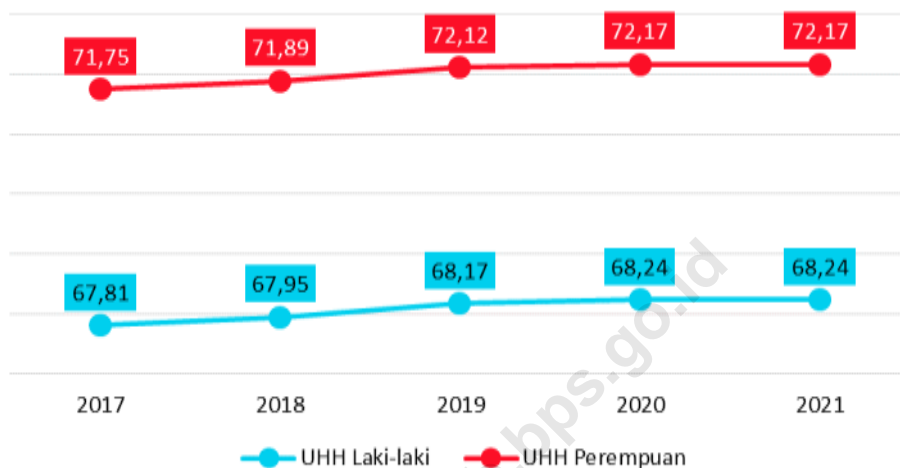
Kesehatan adalah kebutuhan mendasar dalam kehidupan yang mencerminkan kualitas dari sumber daya manusia. Untuk memperoleh hal tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pembangunan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan

pelayanan. Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan semua lapisan masyarakat memperoleh kesehatan secara mudah, leluasa, dan murah.

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan selain angka kesakitan, dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang dijadikan sebagai tolok ukur dari kinerja pemerintah dalam upaya melaksanakan pembangunan kesehatan. UHH adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seseorang. UHH merupakan indikator penting yang mencerminkan taraf kesehatan masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak dari pelaksanaan hasil pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Kata kesehatan dapat dimaknai sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan).

Secara umum tren UHH baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan selalu mengalami peningkatan dari periode 2017 hingga 2021 (Gambar 4.4.1). Hal ini mengindikasikan pembangunan kesehatan di Kabupaten Indragiri Hulu telah berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan penduduk. Besaran UHH menunjukkan adanya perbedaan level capaian antara UHH perempuan dan laki-laki. Level UHH penduduk laki-laki lebih rendah sekitar 4 tahun dibanding level UHH penduduk perempuan. Selama periode 2017-2021, pergerakan UHH perempuan dan laki-laki Kabupaten Indragiri Hulu meningkat namun tidak terlalu signifikan.

Gambar 4.4.1 Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Gender di Kabupaten Indragiri Hulu (tahun), 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Riau

Perbedaan level atau gap yang terjadi pada UHH merupakan fenomena yang umum. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor biologis dan gaya hidup. Laki-laki lebih rentan terhadap infeksi prenatal atau masalah lain di dalam kandungan saat dilahirkan. Selain itu perkembangan secara fisik laki-laki lebih lambat dibandingkan perempuan sebelum lahir. Hal itulah yang menyebabkan laki-laki lebih berisiko meninggal jika lahir prematur.

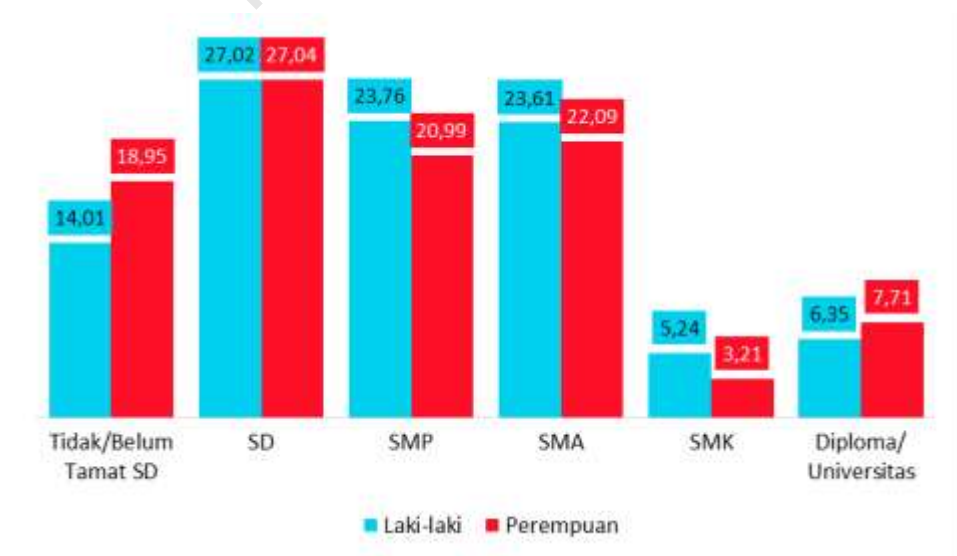
Dilihat dari aspek gaya hidup, secara umum lebih banyak laki-laki yang bekerja dan beraktivitas di luar dibandingkan dengan perempuan. Padatnya aktivitas kerja yang dilakukan tentu berpotensi “mendatangkan” berbagai macam risiko, seperti stres, depresi, lingkungan yang tidak sehat, obesitas, hingga ke penyakit-penyakit menular yang berbahaya. Selain itu pekerjaan yang berisiko seperti supir, pekerja bangunan, dan lain-lain lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Akibatnya risiko kecelakaan kerja juga lebih banyak dialami laki-laki dibandingkan perempuan.

4.5. Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Pendidikan juga merupakan salah satu aspek yang dapat digunakan untuk melihat kesetaraan gender. Di Kabupaten Indragiri Hulu, kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai setara. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka kesenjangan antara laki-laki dan perempuan sudah mulai berkurang (Gambar 4.5.1).

Persentase perempuan yang memiliki ijazah perguruan tinggi melebihi persentase laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat yang memprioritaskan laki-laki untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi dibanding perempuan sudah mulai memudar. Namun pada jenjang pendidikan SD, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat, persentase perolehan ijazah laki-laki masih lebih besar dibandingkan perempuan.

Gambar 4.5.1 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Jenis Kelamin dan Ijazah Tertinggi yang Diperoleh, 2021

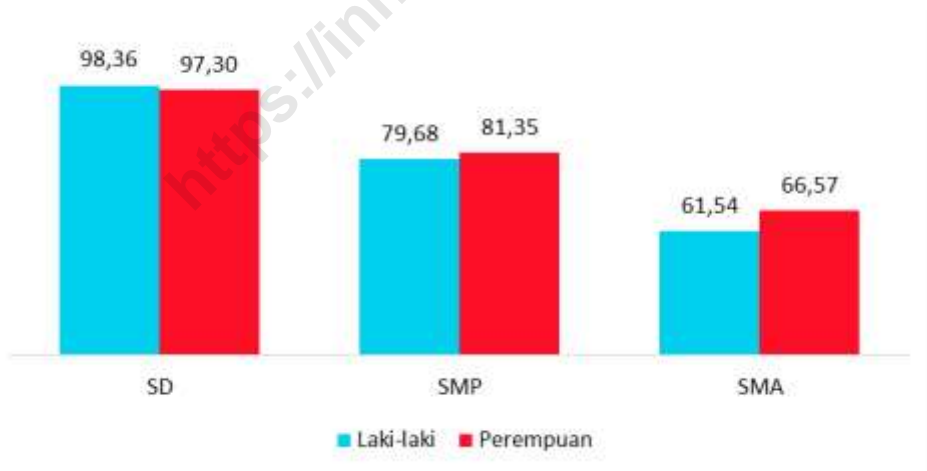


Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2021

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat juga dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan dan laki-laki pada tiga jenjang pendidikan (Gambar 4.5.2). APM adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya.

Pada tahun 2021, APM perempuan pada jenjang SMP dan SMA lebih tinggi dari APM laki-laki, hal ini menunjukkan bahwa kesempatan perempuan untuk bersekolah pada jenjang tersebut lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tingginya APM pada jenjang SMA merupakan prestasi bagi perempuan di Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengejar ketertinggalannya dalam aspek pendidikan pada level yang lebih tinggi.

Gambar 4.5.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Indragiri Hulu, 2021

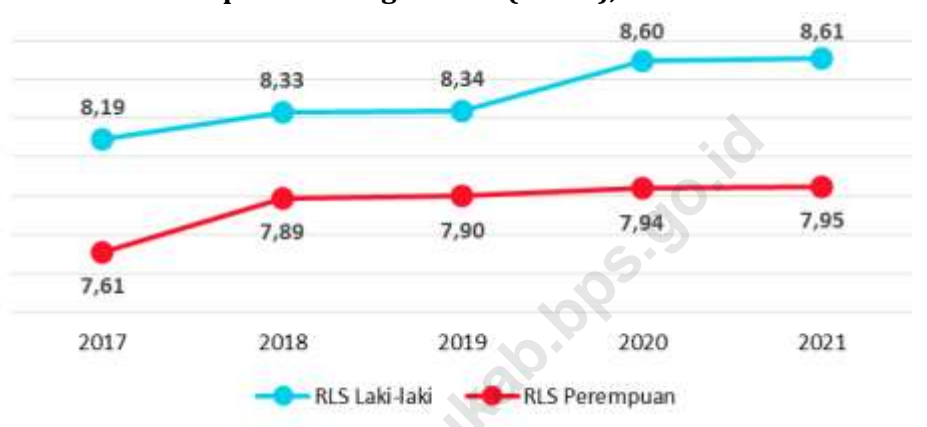


Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2021

Angka indikator pendidikan lain adalah rata-rata lama sekolah. Selama periode 2017-2021, pola peningkatan angka rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan di Kabupaten Indragiri Hulu tidak jauh berbeda (Gambar 4.5.3). Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah laki-laki masih lebih tinggi dari perempuan. Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah laki-

laki sebesar 8,61 tahun atau setara dengan kelas IX (3 SMP) namun tidak selesai, sedangkan untuk perempuan sebesar 7,95 tahun atau setara dengan kelas VIII (2 SMP) namun tidak selesai.

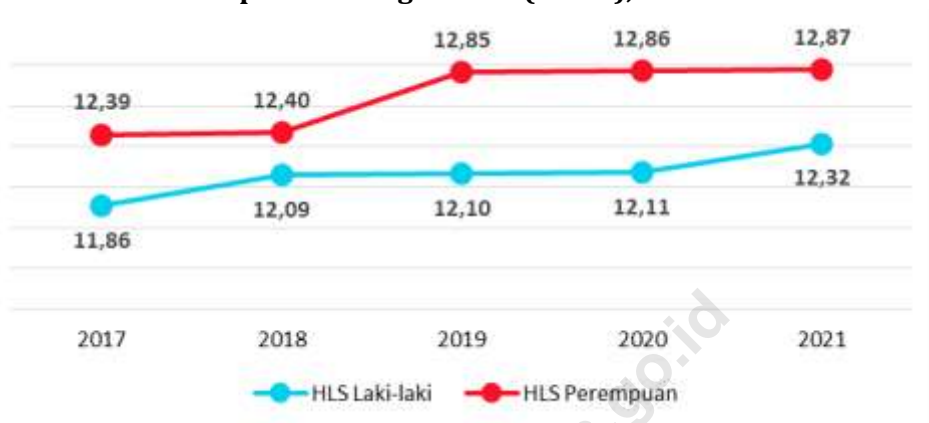
Gambar 4.5.3 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu (tahun), 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Riau

Meskipun rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah dari laki-laki, namun harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mengasumsikan bahwa peluang seorang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Gambar 4.5.4 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Indragiri Hulu (tahun), 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Riau

Pada periode 2017-2021, angka HLS terus meningkat untuk tiap tahunnya baik untuk laki-laki maupun perempuan di Kabupaten Indragiri Hulu. Dari gambar 4.5.4 terlihat bahwa HLS perempuan di Kabupaten Indragiri Hulu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Angka HLS tersebut menunjukkan adanya peluang yang hampir sama bagi perempuan dan laki laki untuk bersekolah selama 13 tahun (lulus SMA dan melanjutkan hingga Diploma I).

4.6. Ketidaksetaraan Gender dalam Kegiatan Ekonomi

Salah satu komponen pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dalam pendapatan. Namun data pendapatan belum dapat dikumpulkan sehingga didekati dengan pengeluaran. Dalam konteks pembangunan gender, kontribusi laki-laki dan perempuan dalam ekonomi diestimasi dengan beberapa indikator yaitu kontribusi upah, angkatan kerja, dan jumlah penduduk terpilah gender.

Gambar 4.6.1 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita dalam Setahun Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu (ribu rupiah), 2017-2021



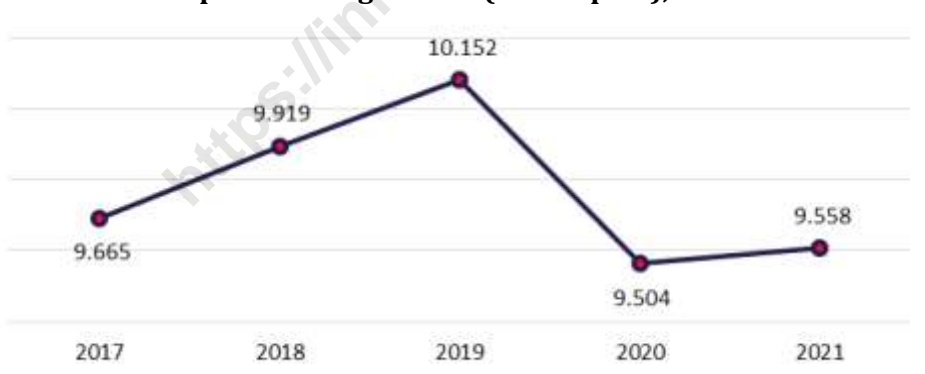
Sumber: BPS Provinsi Riau

Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki di Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan rata-rata pengeluaran laki-laki mencapai 16,29 juta rupiah per tahun, sedangkan perempuan sekitar 6,53 juta rupiah per tahun. Hal ini disebabkan segregasi pekerjaan berdasarkan gender di pasar tenaga kerja Kabupaten Indragiri Hulu masih terjadi hingga saat ini. Perempuan belum bisa memasuki seluruh lapangan pekerjaan yang ada. Masih ada beberapa lapangan usaha yang didominasi oleh laki-laki. Sebagai contoh adalah pekerjaan di lapangan usaha listrik, gas dan air, serta angkutan, perdagangan dan komunikasi yang lebih didominasi oleh laki-laki. Padahal produktivitas pada lapangan-lapangan usaha tersebut cukup tinggi di antara lapangan usaha lainnya (Kemenaker, 2015). Selain itu, umumnya perempuan bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, bukan sebagai tulang punggung yang utama.

Selisih pendapatan yang dihitung dari pengeluaran laki-laki dan perempuan mulai dari 9,67 juta rupiah di tahun 2017 meningkat menjadi

10,15 juta rupiah di tahun 2019. Selisih pendapatan ini kembali mengecil menjadi 9,56 juta rupiah pada tahun 2021 (Gambar 4.6.2). Artinya, selisih pendapatan laki-laki dan perempuan sedikit mengecil pada tahun 2021 dibanding pada tahun 2017. Terdapat cukup peluang untuk kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan di masa datang. Peningkatan jumlah angkatan kerja dan pekerja perempuan diharapkan dapat memperkecil selisih pendapatan. Terlebih lagi jika didukung oleh peningkatan kapabilitas perempuan maka diharapkan kesenjangan ini akan makin kecil. Di sisi lain, dengan berkurangnya fungsi domestik perempuan akibat perkembangan teknologi yang menyebabkan pekerjaan rumah tangga semakin mudah, diharapkan dapat membuka peluang besar bagi perempuan untuk berkontribusi lebih besar dalam ekonomi (Jayachandran, 2014).

Gambar 4.6.2 Selisih Pengeluaran Laki-Laki dan Perempuan di Kabupaten Indragiri Hulu (ribu rupiah), 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Riau

4.7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks yang dirancang untuk mengukur kesetaraan gender. IDG adalah salah satu usaha UNDP untuk mengukur ketidaksetaraan gender antar negara, menggunakan ukuran estimasi pendapatan relatif wanita, partisipasi di posisi ekonomi

dengan bayaran tinggi, dan akses ke posisi parlemen dan profesional. Indeks ini diperkenalkan bersamaan dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG), tapi mencakup topik-topik seperti pemberdayaan yang tidak tercakup dalam IPG.

Gambar 4.7.1 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Indragiri Hulu, 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Riau

Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pemberdayaan perempuan di Riau, maka pengukuran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi sangat penting. Pada tahun 2021 IDG Kabupaten Indragiri Hulu tercatat sebesar 51,46 atau menurun 0,25 poin dibanding tahun 2020. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan ketimpangan pemberdayaan antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2021.

Dalam lima tahun terakhir, penurunan IDG cukup signifikan dan menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk semakin mempercepat program pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, perempuan mampu mengejar ketertinggalannya dari laki-laki.

LAMPIRAN



**Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Indragiri Hulu,
2016-2021**

Tahun	IPM
2016	68,67
2017	68,97
2018	69,66
2019	70,05
2020	69,83
2021	70,01

Sumber: BPS Provinsi Riau

**Lampiran 2. Umur Harapan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu (Tahun),
2016-2021**

Tahun	UHH
2016	69,79
2017	69,83
2018	69,97
2019	70,20
2020	70,25
2021	70,26

Sumber: BPS Provinsi Riau

Lampiran 3. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hulu (Tahun), 2016-2021

Tahun	HLS
2016	12,24
2017	12,29
2018	12,32
2019	12,35
2020	12,36
2021	12,46

Sumber: BPS Provinsi Riau

**Lampiran 4. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Indragiri Hulu
(Tahun), 2016-2021**

Tahun	RLS
2016	7,83
2017	7,89
2018	8,16
2019	8,17
2020	8,38
2021	8,39

Sumber: BPS Provinsi Riau

**Lampiran 5. Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan
Kabupaten Indragiri Hulu (ribu rupiah/orang/tahun),
2016-2021**

Tahun	PPP
2016	10.068
2017	10.223
2018	10.481
2019	10.738
2020	10.202
2021	10.260

Sumber: BPS Provinsi Riau

**Lampiran 6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Indragiri Hulu, 2017-2021**

Tahun	IPG
2017	86,58
2018	86,61
2019	87,33
2020	86,94
2021	86,69

Sumber: BPS Provinsi Riau

**Lampiran 7. Indeks Pembangunan Manusia Laki-Laki
Kabupaten Indragiri Hulu, 2017-2021**

Tahun	IPM Laki-Laki
2017	73,35
2018	74,08
2019	74,43
2020	74,33
2021	74,62

Sumber: BPS Provinsi Riau

**Lampiran 8. Indeks Pembangunan Manusia Perempuan
Kabupaten Indragiri Hulu, 2017-2021**

Tahun	IPM Perempuan
2017	63,51
2018	64,16
2019	65,00
2020	64,62
2021	64,69

Sumber: BPS Provinsi Riau

Lampiran 9. Umur Harapan Hidup Laki-Laki Kabupaten Indragiri Hulu (Tahun), 2017-2021

Tahun	UHH Laki-laki
2017	67,81
2018	67,95
2019	68,17
2020	68,24
2021	68,24

Sumber: BPS Provinsi Riau

Lampiran 10. Umur Harapan Hidup Perempuan Kabupaten Indragiri Hulu (Tahun), 2017-2021

Tahun	UHH Perempuan
2017	71,75
2018	71,89
2019	72,12
2020	72,17
2021	72,17

Sumber: BPS Provinsi Riau

**Lampiran 11. Harapan Lama Sekolah Laki-Laki Kabupaten Indragiri
Hulu (Tahun), 2017-2021**

Tahun	HLS Laki-laki
2017	11,86
2018	12,09
2019	12,10
2020	12,11
2021	12,32

Sumber: BPS Provinsi Riau

Lampiran 12. Harapan Lama Sekolah Perempuan Kabupaten Indragiri Hulu (Tahun), 2017-2021

Tahun	HLS Perempuan
2017	12,39
2018	12,40
2019	12,85
2020	12,86
2021	12,87

Sumber: BPS Provinsi Riau

Lampiran 13. Rata-Rata Lama Sekolah Laki-laki Kabupaten Indragiri Hulu (Tahun), 2017-2021

Tahun	RLS Laki-laki
2017	8,19
2018	8,33
2019	8,34
2020	8,60
2021	8,61

Sumber: BPS Provinsi Riau

Lampiran 14. Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Kabupaten Indragiri Hulu (Tahun), 2017-2021

Tahun	RLS Perempuan
2017	7,61
2018	7,89
2019	7,90
2020	7,94
2021	7,95

Sumber: BPS Provinsi Riau

Lampiran 15. Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Laki-Laki di Kabupaten Indragiri Hulu (Ribu Rupiah), 2017-2021

Tahun	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Laki-Laki
2017	16.077
2018	16.472
2019	16.876
2020	15.963
2021	16.043

Sumber: BPS Provinsi Riau

Lampiran 16. Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Perempuan di Kabupaten Indragiri Hulu (Ribu Rupiah), 2017-2021

Tahun	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Perempuan
2017	6.412
2018	6.553
2019	6.724
2020	6.459
2021	6.485

Sumber: BPS Provinsi Riau

**Lampiran 17. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Indragiri Hulu, 2017-2021**

Tahun	IDG
2017	62,79
2018	59,00
2019	52,65
2020	51,71
2021	51,46

Sumber: BPS Provinsi Riau

Lampiran 18. Persentase Keterlibatan di Parlemen menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Indragiri Hulu, 2017-2021

Tahun	Persentase Keterlibatan di Parlemen	
	Laki-Laki	Perempuan
2017	35	5
2018	35	5
2019	39	1
2020	39	1
2021	39	1

Sumber: Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Angka, 2018-2022



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Jl. Batu Canai Pematang Reba 29315

Telp (0769) 341285

Homepage: <https://inhukab.bps.go.id/>